

# **PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA DI KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh:**

Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

## **Abstrak**

Pelanggaran Kekayaan Intelektual terkait pelanggaran Hak Cipta merupakan masalah global di seluruh negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas dalam memberikan pelayanan di bidang kekayaan intelektual yang salah satunya adalah melakukan penegakan hukum di bidang Hak Cipta. Salah satu jenis pelanggaran Hak Cipta adalah pembajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk melindungi karya cipta dari pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap pembajakan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka, studi lapangan dan wawancara yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penyebab terjadinya pembajakan hak cipta adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih menyukai membeli barang bajakan dan penindakan terhadap pelaku pembajakan sulit untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terus berupaya melakukan pencegahan pembajakan Hak Cipta dengan melaksanakan promosi, sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat akan lebih memahami akan pentingnya perlindungan Hak Cipta sehingga tidak melakukan pembajakan Hak Cipta.

Kata Kunci: Pencegahan, Pembajakan, Hak Cipta.

**THE ROLE OF REGIONAL OFFICE OF MINISTRY OF LAW AND  
HUMAN RIGHTS OF RIAU ISLANDS TO PREVENT COPYRIGHT PIRACY  
IN TANJUNGPINANG CITY**

**By:**

Amry Nofaldi  
NIM. 180574201107

**Abstract**

*Intellectual Property Infringement related to Copyright infringement is a global problem in all countries. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Riau Islands based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 30 of 2018 concerning Organization and Work Procedures of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has the task of providing services in the intellectual property sector, one of which is to enforce Copyright law. One type of copyright infringement is piracy. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is one of the legal instruments created to protect copyrighted works from piracy. This study aims to find out how the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the Riau Islands against copyright piracy. The research method used is an empirical legal research method, data collection techniques are by conducting literature studies, field studies and interviews related to copyright infringement. The results obtained are that the cause of copyright piracy is the socio-economic condition of the people who prefer to buy pirated goods and it is difficult to take action against the perpetrators of piracy because Law Number 28 of 2014 concerning Copyright states that copyright infringement is a complaint offense. The conclusion of this study is that the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Riau Islands continues to strive to prevent copyright piracy by carrying out promotion, socialization and dissemination to the public. It is hoped that through this activity the public will better understand the importance of copyright protection so as not to commit copyright piracy.*

*Keywords: Prevention, Piracy, Copyright.*